

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kinerja di bidang ekonomi dan politik di Indonesia telah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu langkah untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah melalui upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang dikenal dengan istilah *good governance*. Terselenggaranya *good governance* mencerminkan tingkat kejujuran pemerintah dan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita suatu negara. Oleh karena itu, pelaku utama pelaksanaan *good governance* dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat.

Isu *Good Governance* menjadi perhatian utama dalam administrasi publik saat ini. Masyarakat menuntut pemerintah, terutama pelaksana pemerintahan hingga pengambil kebijakan, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka, respon yang baik dari pemerintah diperlukan untuk merespon tuntutan wajar masyarakat ini, melalui perubahan dan perbaikan yang terarah, guna mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik (Azmal, 2018).

Menurut Auditya (2013) Tata Kelola yang baik merujuk pada penerapan otoritas di bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur berbagai urusan publik dalam suatu negara. Ciri-ciri utama dari tata kelola pemerintahan

yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kemampuan menegakkan aturan hukum, serta pengelolaan yang dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasar pada Werimon et al. (2007) penerapan akuntabilitas dan transparansi mengakibatkan adanya pengawasan yang intensif dari masyarakat, memastikan pengelolaan pemerintahan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Maka, ini akhirnya bisa menciptakan kinerja pemerintahan yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah, diharapkan tata kelola akan menjadi lebih baik. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah. Kinerja pemerintah daerah sangat terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance. Berdasar pada Mardiasmo (2009), evaluasi kinerja sangat penting untuk menentukan tanggung jawab manajer dan organisasi dalam menyediakan layanan publik yang baik. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan performa pemerintah daerah.

Menurut (Sahala Purba et al., 2022), akuntabilitas merupakan kontrol penuh aparaturnya pemerintah atas segala tindakan dalam pemerintahan. Peran pemerintah sebagai agen menjadi kunci dalam mempertanggungjawabkan kinerja kepada prinsipal atau rakyat. Akuntabilitas diharapkan dapat mengubah kondisi pemerintahan yang kurang optimal dalam memberikan pelayanan, mencegah korupsi, dan meminimalisir penyelewengan kekuasaan.

Selain akuntabilitas, transparansi juga memengaruhi kinerja organisasi layanan publik. Transparansi menjamin akses informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Oleh karena itu, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dengan informasi yang memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Putra, 2014).

(Sayuti et al., 2018) mencatat bahwa transparansi dan akuntabilitas publik adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dalam tata kelola yang baik. Penerapan transparansi dan akuntabilitas publik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi konsekuensi logis. Isu-isu terkait transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai atau pejabat pemerintahan. Evaluasi kinerja pemerintah perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keuangan dan non-keuangan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP). LjKIP berfungsi sebagai media untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat, memerlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat serta lembaga pemerintahan.

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan reformasi birokrasi, berfokus pada pencapaian outcomes, dan usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini mengubah fokus dari seberapa besar dana yang dihabiskan menjadi seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mengetahui implementasi SAKIP dan mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk konsisten meningkatkan implementasi SAKIP, dengan mempertimbangkan berbagai aspek manajemen kinerja.

Evaluasi AKIP memberikan simpulan hasil penilaian terhadap beberapa variabel, termasuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen ini dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria dengan memilih dari kategori yang tersedia yakni AA, A, BB, B, CC, C, D, atau E. Tujuan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses akuntabilitas di lingkungan pemerintah yaitu untuk perbaikan kinerja ke depannya. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh aspek kinerja dan pencapaian tujuan dapat dilaporkan secara jujur dan transparan kepada masyarakat. Melalui langkah ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat terjaga, dan implementasi good governance dapat tercapai secara lebih efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan, oleh (Novatiani et al., 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah berjalan dengan

baik di SKPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik di SKPD Kabupaten Bandung Barat. Analisis hipotesis penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kualitas kinerja lembaga pemerintah secara parsial. Selain itu, analisis hipotesis juga menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas kinerja lembaga pemerintah secara parsial. Transparansi dan akuntabilitas, jika digabungkan, memiliki pengaruh terhadap kualitas kinerja lembaga pemerintah. Selanjutnya penelitian oleh Ati Rosliyati (2019) ditunjukkan apabila Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian sebelumnya yang berbeda mendorong para peneliti untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan Evaluasi AKIP. Penelitian ini menggunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai objek studi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerima penghargaan di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 10 Februari 2019, sebagai bukti komitmen dan komitmennya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Muara Enim menerima nilai sangat baik dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun yang sama, Kabupaten Muara Enim memperoleh skor tertinggi di Sumatera Selatan. (https://muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/407).

Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) disajikan dalam tabel di bawah ini. Selama lima tahun, evaluasi ini mencakup elemen-elemen SAKIP seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja:

Tabel 1.1
Bobot Nilai SAKIP

No	Keterangan	Nilai	Kategori
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2018	75,07	BB
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2019	74,54	BB
3.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2020	73,48	BB
4.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2021	74,54	BB
5.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2022	74,83	BB

Hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 menunjukkan penurunan nilai menjadi 73,48 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut observasi awal. Penurunan ini diduga disebabkan oleh terungkapnya kasus suap yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah daerah pada 11 Agustus 2019, yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. (<http://suara.com/news/2020/08/11/115451/kasus-proyek-jalan-kpk-panggil-kepala-bapenda-kab-muara-enim-rinaldo>).

Merujuk pada kejadian tersebut, para peneliti ingin menilai seberapa efektif pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Masyarakat juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Evaluasi AKIP sebagai Variabel Intervening”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi sebelumnya, masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*).
2. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat sehingga menimbulkan suatu keidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mendorong Instansi Pemerintah dalam mewujudkan capaian kinerja yang memuaskan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang ada dalam penelitian, dan mengingat keterbatasan yang ada seperti kemampuan, waktu, dan biaya, maka Peneliti membatasi ruang lingkup SUBJEK PENELITIAN adalah 35 (tiga puluh lima) Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Muara Enim. Sedangkan OBJEK PENELITIAN dibatasi pada variabel dependen yaitu Transparansi dan Akuntabilitas, dan variabel independen terdiri dari Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Peneliti juga menggunakan satu variabel intervening, yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yang timbul, yang berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi dan dibahas sebelumnya. Dalam penelitian ini, masalah berikut akan dianalisis:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah ?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap evaluasi AKIP?
4. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap evaluasi AKIP?
5. Bagaimana pengaruh evaluasi AKIP terhadap kinerja pemerintah daerah?
6. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi Evaluasi AKIP?
7. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi evaluasi AKIP?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap Evaluasi AKIP
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap Evaluasi AKIP
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh evaluasi AKIP terhadap kinerja pemerintah daerah
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap evaluasi AKIP.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat mengenai:

1. Teori-teori yang berkenaan dengan nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas publik yang berkaitan dengan Ilmu Manajemen Keuangan.

2. Melakukan telaah atas penelitian terdahulu yang telah melakukan kajian atas teori-teori Transparansi dan Akuntabilitas yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah yang dimediasi Evaluasi AKIP
3. Teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah melalui Evaluasi AKIP
4. Tindak lanjut Instansi Pemerintah atas hasil Evaluasi AKIP
5. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam studi mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Evaluasi AKIP sebagai Variabel Intervening.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengetahui substansi transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tidak terjebak pada pelaksanaan suatu mekanisme kerja yang sifatnya formalitas.
3. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memahami persepsi transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak melakukan kesalahan dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.

1.7 Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Program dan Keuangan melalui Evaluasi AKIP .

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori akan dijelaskan tinjauan pustaka sebagai referensi penelitian tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Program dan Keuangan melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi desain dan jadwal penelitian, data penelitian, definisi operasional variabel, konsep dan metode penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari subyek penelitian, deskripsi data, analisa data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan.